

**WALIKOTA SOLOK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**WALIKOTA SOLOK,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** | 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; |
| **Mengingat** | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kota Madya Payakumbuh; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815); 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985) ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5); 13. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36); 14. Peraturan Walikota Solok Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 57). |
| **M E M U T U S K A N :** | | |
| **Menetapkan** | **:** | **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dispenduk KB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Penyelenggaraan Pemerintah adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada seluruh unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Pelayanan Ekternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. SOP Dispenduk KB dimaksudkan sebagai panduan dan pedoman dalam mengidentifikasikan, merumuskan, menyusun dan mengembangkan SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :
3. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan; dan
5. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP SOP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup SOP Dispenduk KB meliputi seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan internal maupun ekternal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**BAB IV**

**PENYUSUNAN, SYARAT DAN TAHAPAN PENYUSUNAN SOP**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan SOP**

**Pasal 4**

1. Proses penyusunan SOP pada Dispenduk KB dikoordinasikan oleh Sekretaris.
2. Nama-nama SOP Dispenduk KB tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**

**Syarat Penyusunan SOP**

**Pasal 5**

Syarat SOP meliputi :

1. mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
2. mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi;
3. memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP;
4. memperhatikan SOP yang telah dilakukan;
5. melibatkan minimal 2 (dua) orang atau pihak; dan
6. menghasilkan paling sedikit 1(satu) output tertentu.

**Bagian Ketiga**

**Tahapan Penyusunan SOP**

**Pasal 6**

Tahapan Penyusunan SOP meliputi :

1. persiapan;
2. penilaian kebutuhan;
3. pengembangan;
4. penerapan; dan
5. pemantauan dan evaluasi.

**BAB V**

**PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

1. Kepala Dinas wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP.
2. Kepala Dinas dapat melakukan pengembangan SOP sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit organisasi penyelenggara kegiatan.
2. Evaluasi SOP dapat dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok atau lembaga independen yang diminta bantuannya oleh pemerintah daerah.

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 67 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

|  |  |
| --- | --- |
| Ditetapkan di | SOLOK |
| Pada Tanggal | 2 Oktober2017 |
| **WALIKOTA SOLOK,**  DTO | |
| **ZUL ELFIAN** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Diundangkan di | SOLOK |
| Pada Tanggal | 2 Oktober 2017 |
| **SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,**  **DTO**  **RUSDIANTO** | |

**BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 44**

**LAMPIRAN :**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMOR** | **:** | **44 TAHUN 2017** |
| **TANGGAL** | **:** | **2 OKTOBER 2017** |
| **TENTANG** | **:** | **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |

| **No.** | **NAMA SOP** | **NOMOR** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN** | | |
| 1 | Pengelolaan Surat Masuk | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 2 | Pengelolaan Surat Keluar | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 3 | Peminjaman Kendaraan Dinas | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 4 | Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 5 | Proses Cuti | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 6 | Penilaian SKP | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 7 | Pengurusan Kartu Pegawai | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 8 | Pengurusan Kartu Istri dan Suami | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 9 | Pengajuan Pensiun | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 10 | Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjukan Langsung) | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 11 | Pengadaan Barang Asset dan Habis Pakai (Pembelian Langsung) | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 12 | Pemeriksaan Barang | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 13 | Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 14 | Kenaikan Pangkat | B.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| **SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN** | | |
| 15 | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 16 | Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 17 | Pengajuan SPP Gaji, UP, GU, TU, LS | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 18 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 19 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 20 | Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 21 | Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 22 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPPKB | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 23 | Penyusunan LKPJ | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 24 | Penyusunan LPPD | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 25 | Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 26 | Pencairan Dana | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 27 | Verivikasi SPJ | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 28 | Penyusunan Laporan Keuangan | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 29 | Pencairan Dana | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| 30 | Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai | A.1/SOP/Sekre/DPPKB-2017 |
| **SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN BER-KB** | | |
| 31 | Rapat Sosialisasi Kampung KB | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 32 | Pembuatan Sambutan Kepala Dinas | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 33 | Undangan Rapat Pelaksanaan Kegiatan | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 34 | Pelaksanaan Perencanaa Kampung KB | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 35 | Pembuatan SK Wako | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 36 | Persiapan Penetapan Lokasi Kampung KB | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 37 | Prosedur Penilaian Pengelolaan Program KB dan Peserta KB | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| **SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB** | | |
| 38 | Surat Undangan Rapat | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 39 | Evaluasi Kegiatan HKG PKK KB Kes, TNI/IBI KB Kes | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 40 | Rapat Evaluasi Program KKB | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 41 | Pencanangan HKG PKK KB Kes, TNI/IBI KB Kes | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 42 | Pelayanan KB dengan Mobile (Mobil Muyan dan Lapangan) | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| **SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI** | | |
| 43 | Pelaporan Alokon/ Non Alokon | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 44 | Peyimpanan Alokon/ Non Alokon | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 45 | Penerimaan Alokon/ Non Alokon | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 46 | Permintaan Alokon/ Non Alokon | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 47 | Perencanaan Alokon/ Non Alokon | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| 48 | Pendistribusian Alokon/ Non Alokon | /SOP/KB/DPPKB-2017 |
| **SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB** | | |
| 49 | Pengisian Formulir Pendataan Keluarga | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 50 | Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 51 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Keluarga | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 52 | Pembekalan Kader Pendata | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| **SEKSI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER KB** | | |
| 53 | Rapat Persiapan Jambore Tk Kota dan Tk Propinsi | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 54 | Penetapan SK Wako Panitia Pelaksana Jambore Tk Kota dan Tk Provinsi | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 55 | Pembukaan Jambore Tk Kota | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 56 | Penyelenggaraan Jambore Kader | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 57 | Pembinaan PLKB/PKB dan Kader IMP | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 58 | Pertemuan 1000 Kader | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| **SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN** | | |
| 59 | Pemutaran Film KB | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| **SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA** | | |
| 60 | Penyelenggaraan Jambore Saka | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 61 | Pembinaan Ke Kelompok PIK/BKR | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 62 | Sosialisasi PIK KRR | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 63 | Pembuatan SK Wako untuk Kader BKR/PIK | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 64 | Pemilihan Duta Genre Tingkat Kota | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 65 | Pembuatan Surat Tugas Pembinaan ke Kelompok PIK/BKR | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| **SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA** | | |
| 66 | Kegiatan Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS Tk. Prov dan Kota | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| 67 | Survey dan Pembinaan Kelompok UPPKS | A.10/SOP/DPPKB-2017 |
| **SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA BALITA, ANAK DAN LANSIA** | | |
| 68 | Pembuatan SK Wako Kader BKB dan BKL | /SOP/K3/DPPKB-2017 |
| 69 | Undangan Pelaksanaan Kegiatan | /SOP/K3/DPPKB-2017 |
| 70 | Permintaan Nara Sumber Pelaksanaan Kegiatan | /SOP/K3/DPPKB-2017 |
| 71 | Pembuatan Surat Tugas | /SOP/K3/DPPKB-2017 |
| 72 | Pembuatan Sambutan Pelaksanaan Kegiatan | /SOP/K3/DPPKB-2017 |
| 73 | Rapat Tribima | /SOP/K3/DPPKB-2017 |
| 74 | Pertemuan Orang Tua Hebat di Kampung KB | /SOP/K3/DPPKB-2017 |
| 75 | Pertemuan Lintas Sektor BKB HI Tk. Kota | /SOP/K3/DPPKB-2017 |
| 76 | Pembinaan Kader Kelompok BKB dan BKL | /SOP/K3/DPPKB-2017 |

**WALIKOTA SOLOK,**

DTO

**ZUL ELFIAN**